

Revitalisasi BUMDes Jaya Janti Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Itok Dwi Kurniawan¹, Ismawati Septiningsih², Zakki Adhliyat³, Heri Hartanto⁴
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36, Kentingan, Jebres, Surakarta
Email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id¹

Received 16 November 2024; Revised 23 February 2025; Accepted for Publication 24 February 2025; Published 30 May 2025

Abstract — Community Service (PKM HGR-UNS) was carried out by socialization partners, namely BUMDesa Jaya Janti with the title "Revitalization of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Jaya Janti as an Effort to Recover the Economy". This service is in the form of assistance to partners in efforts to revitalize the management and management of BUMDesa. This activity is carried out through several preparalogical, technical, and cumulative steps. The PKM HGR-UNS program on the revitalization of BUMDesa Jaya Janti in Janti Village, Pulonharjo District, Klaten has been implemented well. This activity can help overcome problems regarding the preparation of financial statements and the overlap of central and regional taxes by implementing appropriate measures so as to contribute to the increase in local original income which is fully used for the prosperity of the village community.

Keywords — reports, revitalization, taxes

Abstrak— Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM HGR-UNS) dilakukan dengan sosialisasi ke mitra yakni BUMDesa Jaya Janti dengan judul "Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti sebagai Upaya Recovery Perekonomian". Pengabdian ini berupa pendampingan kepada mitra dalam upaya revitalisasi pengelolaan dan manajemen BUMDesa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa langkah persiapan, teknis, dan kumulatif. Program PKM HGR-UNS tentang revitalisasi BUMDesa Jaya Janti di Desa Janti Kecamatan Pulonharjo, Klaten telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dapat membantu mengatasi permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan dan tumpang tindihnya pajak pusat dan daerah dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat sehingga memberikan sumbangsih terhadap kenaikan pendapatan asli daerah yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat desa.

Kata Kunci— laporan, pajak, revitalisasi

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pembangunan Nasional dititikberatkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama dari sebuah pembangunan yang beriringan dengan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan merupakan sebuah cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemandirian masyarakat. Pembangunan dapat dilihat sebagai suatu proses perubahan dari keadaan ekonomi yang stagnan menjadi pertumbuhan kumulatif yang sifatnya terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan dari suatu negara difokuskan pada tiga hal

yakni, peningkatan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan standar hidup masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sistem sumber di kehidupan.

Fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup di daerah pedesaan, maka jelas bahwa poin sentral pembangunan nasional Indonesia berada di pedesaan. Desa dalam hal ini diartikan sebagai bagian dari sebuah Kabupaten yang memiliki otonomi asli. Sehingga, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi desa memberikan kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, hak asal-usul, dan adat istiadat desa [1]. Munculnya otonomi desa dapat diartikan sebagai salah satu strategi pembangunan desa guna mendorong desa untuk menciptakan program dan kebijakan yang menuntut pengembangan sumber daya di desa.

Maka pembangunan otonomi desa merupakan salah satu konsekuensi logis dari berbagai tuntutan baik akibat dari perkembangan lingkungan global, lingkungan sosial yang dinamis, atau perkembangan pemerintah yang dipengaruhi politik kepentingan. Desa sebagai salah satu sub sistem pemerintahan nasional memerlukan adaptasi dan antisipasi dalam menghadapi segala perkembangan tersebut. Untuk itu perlu dibentuk berbagai kebijakan dan perangkat peraturan sebagai bingkai untuk pengembangan desa menghadapi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang [2]. Salah satu upaya pemerintah pusat yaitu dengan segera mengeluarkan dan membentuk kebijakan berupa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan desa sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia, oleh karena itu pemerintah perlu untuk terus mendorong pembangunan ekonomi desa [3].

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut adalah guna meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan [4]

Pemerintah daerah menyatakan bahwa desa di kabupaten atau kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat

diatur secara bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa [5]. Salah satu hal yang dapat membangun sumber daya ekonomi dan masyarakat desa adalah dengan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) [6]. Pasal 5 ayat (3) huruf a Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwasannya pengembangan potensi ekonomi lokal terdiri dari pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes.

Bumdes merupakan sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. BUMDes menampung kegiatan-kegiatan ekonomi profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa [7]. BUMDes di masa depan akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut kekhususan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa [8].

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dengan jelas menguraikan bahwa BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam artian ini, BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi [9].

BUMDes menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan badan usaha yang berperan penting dalam menunjang perekonomian desa, dengan adanya BUMDes dapat mendorong masyarakat setempat untuk mengelola desanya menjadi pusat perekonomian yang menumbuhkan pemasukan serta ekonomi bagi masyarakat setempat. Kelebihan lain dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu menciptakan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), membantu masyarakat miskin dan pembangunan pemanfaatan aset-aset desa, secara tidak langsung hadirnya dan hasil dari BUMDes menjadi model pemberdayaan ekonomi dan solusi pembangunan ekonomi desa [10].

Peningkatan kapasitas dan fasilitas bagi pengelola BUMDes tidak dapat dianggap rendah, namun majunya BUMDes jadi besar apabila didukung oleh segala aspek, sehingga merasa bertanggungjawab sebagaimana yang dibuat dalam aturan BUMDes yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) [6].

Persoalan model pemberdayaan ekonomi semestinya itu yang harus tergambarkan, mengingat kondisi dan potensi

desa yang berbeda-beda, kadang ada model pemberdayaan ekonomi masyarakat secara modern dan ekonomi masyarakat secara tradisional perlu dibina secara profesional seluruh Indonesia [6]. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan juga dapat menekan angka kemiskinan yang dari tahun-ketahun bertambah jumlahnya.

Pada pasal 68 Undang-Undang Tentang Desa, sumber pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil pajak daerah Kabupaten Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah di atasnya, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pada komponen sumber pendapatan sebagaimana diuraikan di atas, yang berada di wilayah kewenangan pemerintah desa seutuhnya adalah Pendapatan Asli Desa (PAD). PAD merupakan jenis pendapatan asli desa yang diharapkan memiliki proporsi terbesar [11].

BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Badriyadi menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar perekonomian desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada masyarakat untuk mencari keuntungan.

BUMDes dapat menjalankan bisnis dengan berbagai jenis usaha diantaranya adalah [12]:

1. Bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha yang dapat diterapkan BUMDes meliputi air minum, usaha listrik, lumbung pangan, dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lain;
2. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa
3. Bisnis usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga seperti jasa pembayaran listrik;
4. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang luas;
5. Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
6. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dapat dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan.

Agar BUMDes dapat berkontribusi dengan baik untuk peningkatan pendapatan asli desa, maka perlu untuk disusun sebuah sistem manajemen yang baik, terkhususnya sistem alokasi hasil usaha dari BUMDes. Hasil BUMDes tersebut diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan serta kewajiban dan penyusutan aset setiap tahunnya. Sistem alokasi hasil usaha tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Perhitungan alokasi hasil suatu usaha tersebut dikelola melalui sistem akuntansi yang sederhana [11].

Pengelolaan BUMDes yang baik dan sesuai dengan aturan konseptual pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli desa dan pertumbuhan ekonomi desa [13].

Salah satu BUMDes yang terkenal adalah BUMDes Jaya Janti yang ada di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. BUMDes ini tengah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan adanya bisnis di sektor perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Masyarakat menjadi berdaya secara perekonomian dengan perputaran ekonomi yang cukup baik di Desa Janti. BUMDes ini menjadi menarik perhatian para wisatawan dikarenakan sumber daya alamnya berupa air yang melimpah yang dikelola baik oleh pengurus BUMDes setempat.

Namun, dalam keberjalanan BUMDes Jaya Janti ini memiliki hambatan, yakni kurangnya partisipatif masyarakat setempat. Pengelolaan dan Manajemen yang diterapkan pada BUMDes ini berdasarkan diskusi lapangan dengan BUMDes Jaya Janti masih dinilai kurang, hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam BUMDes. Dukungan serta peran masyarakat setempat dalam mengelola BUMDes yang baik akan membuat kemajuan yang tentu akan meningkatkan BUMDes dari berbagai aspek. Oleh karena itu diperlukan pendampingan revitalisasi pengelolaan dan manajemen BUMDes agar dapat menumbuhkan sikap kesadaran masyarakat.

Dalam artikel ini, desa yang diangkat menjadi studi kasus dari penerapan BUMDes Jaya Janti untuk meningkatkan perekonomian desa adalah Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. BUMDes Jaya Janti terdiri atas warung-warung yang menjual hasil produk UMKM Desa juga terdapat budidaya perikanan lele. Keunggulan dari BUMDes Jaya Janti adalah kolam dengan mata air asli dari sumbernya, sehingga terkesan lebih segar dan asri.

Dengan daya tarik wisata lokal, BUMDes Jaya Janti bisa menggaet para wisatawan dan dapat memasarkan hasil UMKM nya. Sejalan dengan tingginya minat wisatawan tersebut, maka harus diimbangi pula dengan adanya penyusunan laporan keuangan yang sistematis, dan terstruktur. Adanya laporan keuangan yang sistematis dan terstruktur juga dapat membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan bisnis atau organisasi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan BUMDes dari waktu ke waktu.

Berdasarkan diskusi lapangan dengan BUMDes Jaya Janti, kurangnya pengelolaan dan manajemen sesuai dengan prinsip itulah yang berpotensi menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara pajak pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan revitalisasi pengelolaan dan manajemen BUMDes dalam hal meningkatkan optimalisasi penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDes.

II. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Grup Riset (PKM HGR-UNS) melibatkan antara lain Mitra PKM HGR yakni BUMDes Jaya Janti, anggota pengabdian, masyarakat Desa Janti Kecamatan Polanharjo, dan melibatkan mahasiswa.

Kegiatan	Sasaran	Metode Pelaksanaan	Keterangan
Sosialisasi dan Pengabdian ke mitra PKM HGR-UNS, BUMDes Jaya Janti	Mitra PKM HGR-UNS, Pengurus BUMDes Jaya Janti, dan masyarakat Desa Janti Kecamatan Polanharjo.	Ceramah dan diskusi 1 kegiatan x 1 pertemuan 120 menit	Narasumber: Dr. Arsyad Aldyan, S.H., M.H

Sosialisasi berjudul “*Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti sebagai Upaya Recovery Perekonomian*” dengan materi mengenai gambaran potensi desa, analisis situasi, analisis permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes, dan solusi dari permasalahan tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDes.

Metode kegiatan ini menggunakan metode ceramah yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait BUMDes sebagai sarana untuk memberikan pertumbuhan ekonomi, mengedukasi masyarakat terkait optimalisasi sumber daya dalam membangun serta mengelola BUMDes agar terjadi keberjalanan usaha yang kontinuitas dan memberikan langkah pendampingan dalam upaya pengelolaan BUMDes.

Pengabdian ini juga menggunakan metode *built in participatory* dengan cara keterlibatan langsung dalam identifikasi masalah mitra melalui wawancara dan identifikasi permasalahan, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui diskusi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes dibangun berdasarkan atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip yang kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusaha mandiri. [14] Sebagai potensi lokal desa, BUMDes merupakan modal sosial yang diharapkan mampu menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian sehingga menjadi penguat ekonomi dan pendapat asli daerah. Setiap pemerintah desa berhak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa, namun penting untuk disadari bahwa BUMDes juga didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan menggunakan sumber daya daerah.

Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi. Dalam tujuannya, BUMDes sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan lain dari BUMDes yakni dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADes). BUMDes merupakan roda perekonomian desa yang memiliki peran penting dalam menaikkan taraf perekonomian desa. Dapat dikatakan bahwa BUMDes sebagai wadah dari segala potensi dan kebutuhan guna menunjang kesejahteraan masyarakat desa [15].

Desa yang telah berkembang harus diberdayakan dan dilakukan perlindungan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Apabila melihat dari pertimbangan pembentukan undang-undang desa, merupakan keinginan dari pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga yang lebih aktif terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai upaya untuk membentuk lembaga yang lebih aktif, adalah dengan melakukan revitalisasi. Revitalisasi adalah upaya untuk mendaur ulang atau *recycle* dengan tujuan memusatkan kembali fungsi utama, atau dengan kata lain mengembalikan pada vitalitas fungsi utamanya yang telah pudar.

Sasaran BUMDes adalah untuk peningkatan perekonomian desa agar bermanfaat dalam mensejahterakan desa. Dalam hal ini, mekanisme operasional seluruhnya diserahkan kepada masyarakat desa, oleh karena itu masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru mengenai pertumbuhan ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi komersial [16].

Namun, pada faktanya banyak desa belum mampu mengoptimalkan peran BUMDes, sehingga banyak di antaranya mengalami stagnasi. Maka revitalisasi perlu dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menghidupkan BUMDes yang ada. Revitalisasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek penting, salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUMDes [17].

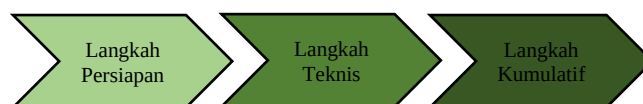
Oleh karena itu, persiapan yang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa. Melalui cara yang demikian tersebut, keberadaan BUMDes diharapkan mampu membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya. Sehingga, Desa perlu melakukan pemberdayaan yang dapat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, kemudian tahap evaluasi. Dengan dilakukannya, hal ini merupakan bagian dari proses pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki desa.

Revitalisasi BUMDes yang dilakukan harus memperhatikan berbagai aspek. Pertama, pendampingan berperan sebagai pendorong utama dalam pengembangan BUMDes, di mana pemerintah berfungsi sebagai pemacu sekaligus pendamping yang membimbing secara bertahap. Kedua, dukungan permodalan menjadi faktor krusial, dengan

penambahan modal yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing BUMDes agar dapat berkembang secara optimal. Ketiga, peningkatan jaringan melalui pembentukan super holding atau BUMDes bersama diperlukan untuk memperluas akses dan memperkuat modal. Keempat, Penguatan sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui program pelatihan dan KKN Tematik bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kelima, koordinasi dengan berbagai pihak, terutama korporasi, penting dalam mendukung regulasi dan kebijakan nasional guna memastikan revitalisasi BUMDes berjalan secara optimal dan berkelanjutan [18].

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM HGR-UNS) Riset Grup Penegakan Hukum dan Globalisasi oleh TIM bagian Hukum Acara FH UNS dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Mei 2024 dengan judul Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti. Pengabdian ini diikuti oleh para dosen bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNS sebagai bagian dari penerapan tri dharma perguruan tinggi yang bertujuan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. BUMDes sebagai instrumen penguatan pembangunan ekonomi desa merupakan tumpuan dan harapan masyarakat.

Pengabdian ini dilaksanakan dengan sasaran bagi masyarakat desa yang terjun dalam pengelolaan BUMDes. Pengabdian ini dilaksanakan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat terkait gambaran umum BUMDes, dasar hukum BUMDes, potensi desa, juga aspek pengelolaan keuangan dan perpajakan mengenai BUMDes. Pendampingan kepada Mitra yakni BUMDes Jaya Janti ditujukan sebagai upaya *revitalisasi* pengelolaan dan manajemen BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa langkah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Sumber: Penulis, 2024

1. Langkah Persiapan

Pada langkah persiapan, dilakukan komunikasi dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dalam masyarakat. Dalam langkah ini ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan sulitnya penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tumpang tindihnya pajak pusat dan pajak daerah yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi desa.

Berdasarkan diskusi lapangan dengan BUMDes Jaya Janti yakni karena kurangnya pengelolaan dan manajemen sesuai dengan prinsip sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara pajak pusat dan daerah.

2. Langkah Teknis

Pada langkah teknis, dilakukan pemilihan tema pengabdian yang sesuai dengan permasalahan mitra sebagaimana uraian diatas, sehingga tema pengabdian yaitu revitalisasi BUMDes sebagai upaya *recovery* perekonomian desa.

3. Langkah Kumulatif

Pada langkah kumulatif, dilakukan pemberian arahan mengenai penyelesaian permasalahan yang diidentifikasi dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Desa Janti Kecamatan Pulonharjo yang terletak di Kabupaten Klaten sangat mendukung untuk dilaksanakannya kegiatan pengabdian dalam upaya revitalisasi BUMDes agar pemulihan ekonomi desa pasca pandemi dapat berangsur signifikan serta mampu mencapai ketahanan ekonomi sebagai desa maju dan mandiri.

Jumlah sasaran daripada kegiatan adalah 40 (empat puluh) orang yang merupakan masyarakat Desa Janti Kecamatan Pulonharjo. Kegiatan ini disambut baik dan turut aktif berperan serta sanggup menghadiri kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi revitalisasi BUMDes agar pemulihan ekonomi desa bagi masyarakat mampu meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam mempromosikan wisata Janti yang merupakan penyokong pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Janti.



Gambar 2. Sosialisasi Revitalisasi Pengelolaan BUMDes Jaya Janti

Sumber: Penulis, 2024



Gambar 3. Partisipasi Aktif Mitra Dalam Sosialisasi Revitalisasi Pengelolaan BUMDes Jaya Janti

Sumber: Penulis, 2024



Gambar 4. Penyerahan Vendel Kepada Mitra
Sumber: Penulis, 2024

Dalam perkembangannya, dewasa ini BUMDes Jaya Janti sendiri telah dapat dikatakan sebagai salah satu dari sekian BUMDes dengan pendapatan terbaik. Pendapatan yang diperoleh merupakan hasil pengelolaan pariwisata, perdagangan, dan perikanan di Desa Janti, Kecamatan Polanrejo, Klaten.

Salah satu objek yang dikelola dan merupakan unggulan dari BUMDes Jaya Janti adalah wisata air Janti Park dengan warung-warung yang menjual hasil produk UMKM Desa serta budidaya ikan lele, Janti Park menjadi andalan karena menawarkan pemandian atau kolam renang dengan kesan yang segar dan asri yang berasal dari kolam mata air asli.



Gambar 4: Janti Park
Sumber: Tribun Solo/Imam Saputro

Keberhasilan yang dicapai oleh BUMDes Jaya Janti merupakan hasil dari seluruh peran dan keikutsertaan masyarakat untuk berdikari dalam pembangunan, terkhusus pada tataran sosial, ekonomi, dan politik pada masyarakat. Pada tahap awal kegiatan, pengabdian telah mengidentifikasi permasalahan mitra dalam hal ini BUMDes Jaya Janti dan menemukan bahwa pengelolaan dan manajemen BUMDes belum berlangsung sesuai standar akibat dari kurangnya pemahaman yang memadai, sehingga hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Dalam hal ini, BUMDes Jaya Janti perlu untuk melakukan strategi yang baik sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan serta sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Strategi yang diambil dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya atau potensi Desa Janti melalui BUMDes Jaya Janti dan dapat menumbuhkan bisnis dengan

melibatkan perencanaan keuangan, manajemen sumber daya, atau fokus pada pernyataan misi atau tujuan.

Dengan strategi, BUMDes Jaya Janti dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang yang ada sembari mengatasi dan meminimalisir kelemahan dan ancaman dari luar, sehingga strategi yang dijalankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditentukan. [19]

Dalam pelaksanaannya, BUMDes Jaya Janti menerapkan berbagai strategi sebagai berikut:

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)
Strategi ini berisi landasan apa saja yang harus dilakukan dan untuk siapa strategi itu digunakan.
2. *Program Strategy* (Strategi Program)
Strategi ini menjelaskan dampak strategi terhadap suatu program yang dilakukan.
3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)
Strategi ini memanfaatkan sumber daya yang ada dalam BUMDes seperti tenaga kerja, teknologi, dan sebagainya.
4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)
Strategi ini berfokus pada ide-ide pengembangan BUMDes.

Dalam pengelolaannya, BUMDes memerlukan strategi eksekusi yang bertahap dan perlu untuk memperhatikan perkembangan inovasi yang dilakukan BUMDes sebagaimana dalam Pasal 25 Permendesa PDPTT No.4 Tahun 2015 yang saat ini dicabut dan digantikan dengan Permendesa PDPTT No. 9 Tahun 2023 pada Pasal yang sama memberikan strategi sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes
2. Membahas perihal BUMDes dalam pelaksanaan musyawarah desa
3. Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan
4. Analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan, dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha
5. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasayarakatan, dan/atau lembaga donor
6. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial bussiness*) dan usaha bersama (*holding*)

Sebagaimana regulasi tersebut di atas, sosialisasi dan pembelajaran yang diterapkan dalam pengabdian ini menjadi dasar fundamental untuk membangun pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat, khususnya para pengurus yang terjun langsung dalam pengelolaan BUMDes.

Pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat menysar pada upaya revitalisasi BUMDes dengan

peningkatan optimalisasi manajemen pengelolaan BUMDes. Materi yang diberikan dengan mengidentifikasi permasalahan mitra yakni terhadap Penyusunan laporan keuangan dan tumpang tindih antara pajak pusat dan pajak daerah.

Materi disampaikan oleh Dr. Arsyad Aldyan, S.H., M.H dengan moderator Dr. Itok Dwi Kurniawan, S.H, M.H. Materi yang dipaparkan dalam mengidentifikasi permasalahan mitra yakni dasar dalam panduan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMDes serta standar akuntansi keuangan. Penyusunan pelaporan keuangan yang baik akan dapat memberikan fungsi, yaitu:

1. Penyajian informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu
2. Membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan bisnis atau organisasi
3. Bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan yang jujur dan terbuka terhadap *stakeholders*
4. Mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu dan dibandingkan dengan kinerja BUMDes lainnya

Dapat digunakan untuk perencanaan keuangan BUMDes untuk merencanakan kegiatan BUMDes yang efektif dan efisien berdasarkan proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas di depan.



Gambar 5. Paparan Materi

Sumber: Penulis, 2024

Berdasarkan fungsi sebagaimana di atas, dengan panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes yang terkelola dengan baik dapat memberikan manfaat besar untuk berbagai hal, termasuk dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset daerah harus dapat merespon dan mengantisipasi perubahan yang berkembang.

Sosialisasi materi penyusunan laporan keuangan menjadi inti pembahasan dan pengabdian dari tim PKM HGR-UNS untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BUMDes sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam sosialisasi ini disampaikan mengenai akuntabilitas dan transparansi. Kualitas keuangan dinilai melalui penyusunan laporan. Hal ini dilakukan untuk

melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Akuntabilitas diperlukan dalam pengelolaan dana publik dan transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dapat dipercaya. Laporan keuangan harus memiliki kualitas dengan indikator bahwa laporan tersebut mampu menggambarkan situasi finansial dan kinerja BUMDes, memungkinkan evaluasi masa lalu dan proyeksi masa depan dengan menggunakan informasi yang tersedia. [20]

Akhir kegiatan pengabdian PKM HGR-UNS dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama dengan para pengurus BUMDes Jaya Janti dan Direktur BUMDes Jaya Janti, Bapak Danang Joko Wijayanti yang berlangsung secara interaktif dengan harapan dapat mengedukasi pengelola BUMDes Jaya Janti dan masyarakat dengan baik.



Gambar 6. Sesi diskusi dengan mitra (BUMDes Jaya Janti)
Sumber: Penulis, 2024

Atas diskusi yang berlangsung, diambil kesimpulan bahwa belum banyak masyarakat yang sadar akan urgensi peran dari BUMDes. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat PKM HGR-UNS berusaha memberikan pendampingan kepada masyarakat secara langsung agar tercipta peningkatan partisipasi yang membawa kemajuan serta optimalisasi peran BUMDes Jaya Janti.

Hasil diskusi juga memaparkan mengenai tumpang tindihnya pengenaan pajak pusat dan daerah terhadap BUMDes Jaya Janti. Bahwa hampir pungutan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah memberikan dampak yang kurang kondusif terhadap iklim investasi, menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan pada pokoknya menyebabkan tumpang tindih dengan pungutan pusat.

Evaluasi pelaksanaan program pengabdian dilaksanakan melalui pembagian kuesioner kepada peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian. Kuesioner tersebut bertujuan untuk mengetahui besarnya pemahaman peserta terkait aspek revitalisasi BUMDes dan *recovery* perekonomian desa.

Keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai dilaksanakan yakni dengan mendampingi masyarakat dalam melakukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan BUMDes dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi desa.

Direktur BUMDes Jaya Janti menanggapi bahwa pelaksanaan pengabdian oleh dosen bagian hukum acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) telah memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes.

“Selama kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim PKM HGR-UNS, para pengurus BUMDes Jaya Janti mendapatkan keterampilan tambahan berupa keterampilan praktis yang dapat langsung diaplikasikan ke dalam pelaporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pengurus dalam menyusun laporan keuangan yang baik, lengkap, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengurus BUMDes Jaya Janti saat ini dapat memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan keuangan dalam berbagai periode baik harian, bulanan, semesteran, hingga tahunan.”

Dengan keterampilan yang didapat dari kegiatan pengabdian ini, pengurus BUMDes Jaya Janti dapat mengelola aset agar dapat membantu ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini adalah dengan dapat dirumuskannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Jaya Janti. Melalui serangkaian kegiatan diskusi dan observasi, tim pengabdian berhasil untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat operasional BUMDes.

Permasalahan yang ditemukan antara lain yakni kurangnya partisipasi dan peran aktif masyarakat terhadap BUMDes. Belum banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya peran pengembangan BUMDes dan minimnya pengetahuan masyarakat serta pengurus akan manajemen dan pengelolaan BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut ditemukan perumusan mengenai kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat serta pengurus dalam hal mengatasi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan lahirnya perumusan masalah ini, diharapkan mampu memberikan dasar bagi penyusunan strategi penyelesaian yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan pengabdian PKM HGR-UNS juga berhasil dalam menciptakan generasi yang lebih sadar dalam memahami pentingnya BUMDes sebagai salah satu penyokong pendapatan asli desa dan daerah. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat, terkhusus pada generasi muda mengenai peran strategis BUMDes dalam upaya meningkatkan dan percepatan pemulihan pasca pandemi telah membuahkan hasil. Partisipasi aktif dan antusiasme bahwa para generasi muda mulai menyadari pentingnya keberadaan BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Indikator keberhasilan lanjutan dari kegiatan Pengabdian PKM HGR-UNS adalah dengan adanya kemampuan masyarakat untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah dalam manajemen pengelolaan BUMDes.

Melalui pelatihan dan *workshop* yang diadakan, masyarakat diberikan keterampilan dan pengetahuan mengenai manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional BUMDes. Hasil akhir terlihat dengan adanya peningkatan kemampuan dalam pengelolaan aset dan sumber daya BUMDes secara optimal. Penerapan manajemen yang jauh lebih baik, diharapkan mampu meningkatkan kontinuitas dan keberlanjutan operasional BUMDes.

Indikator keberhasilan yang terakhir, masyarakat dapat terlihat mulai memahami bahwa upaya revitalisasi BUMDes merupakan salah satu cara untuk peningkatan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan. Kesadaran ini muncul dari berbagai sesi diskusi yang mengangkat isu-isu mengenai peranan BUMDes dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Masyarakat menyadari bahwa dengan memperkuat dan merevitalisasi BUMDes dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Pemahaman ini adalah penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengembangan BUMDes berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Grup Riset (PKM HGR-UNS) tentang revitalisasi BUMDes sebagai upaya *recovery* perekonomian desa di Desa Janti Kecamatan Pulanharjo, Kabupaten Klaten telah terlaksana dengan baik dengan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kegiatan ini berhasil merumuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Jaya Janti, yakni kurangnya partisipasi masyarakat terhadap BUMDes, belum banyak masyarakat yang sadar akan peran pentingnya BUMDes, minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengembangan BUMDes khususnya dalam manajemen dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan dasar sebagai penyusunan strategi penyelesaian efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan pengabdian berhasil menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya BUMDes sebagai penyokong pendapatan asli daerah. Melalui seminar yang diadakan, masyarakat terutama pengurus BUMDes mampu memahami dan menerapkan langkah-langkah dalam manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional BUMDes. Terakhir, pengabdian ini meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai revitalisasi BUMDes sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

Sebagai saran, perlu adanya kebijakan yang lebih konkret dan komprehensif yang mendukung pemberdayaan BUMDes sebagai kunci pembangunan daerah. Program pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan dari pemerintah baik pusat dan daerah akan menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas ekonomi daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Mitra BUMDes Jaya Janti yang telah membantu dengan partisipasi aktifnya dalam kegiatan pengabdian. Terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Danang Joko Wijayanto selaku Direktur BUMDes Jaya Janti dan seluruh pengurus BUMDes Jaya Janti, serta masyarakat di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kalten, Jawa Tengah..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Prawitno, Rahmatullah and Safriadi, "Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa," *KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 5, no. 2, 2019.
- [2] A. Sujono, A. Rajab, A. Larasanti and D. Andreyano, "Pembangunan Desa sebagai Langkah Awal Cita-cita Indonesia dalam Menwujudkan Pemerataan Pembangunan di Wilayah Kepri," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 1, no. 1, 2019.
- [3] H. I. Nur, A. R. Alamri, D. Walah and K. R. Jumiyantri, "Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bulawa," *Insa. Cita Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 1, 2021.
- [4] A. D. Basniwati, "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Village Income and Shopping Budget (Apbdes)," *Jurnal Kompilasi Hukum*, vol. 8, no. 1, 2023.
- [5] R. Sururama and A. A. Masdar, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat," *Jurnal Media Birokrasi*, vol. 2, no. 1, 2020.
- [6] S. Rahayu and R. Febrina, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDES Di Desa Sugai Nibung," *Jurnal Trias Politica*, vol. 5, no. 1, pp. 49-61, 2021.
- [7] I. K. Darwita and D. N. Redana, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng," *LOCUS : Majalah Ilmiah FIA*, vol. 9, no. 1, 2018.
- [8] F. Fitriani and I. Gesmi, "Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, vol. 1, no. 3, 2024.
- [9] H. Sidik, "Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi8 Pedesaan Di Desa Langensari," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, 2020.
- [10] Azhari, "Model Pemberdayaan BUMDES dan Solusi Pembangunan Ekonomi Desa : Suatu Kajian Literatur," *Jurnal J-Iscan*, vol. 2, no. 2, 2019.
- [11] Y. P. Senjani, "Peran Sistem Manajemen pada BUMDES dalam the Role of Management System in Bumdes in Increasing the Real Income of the Village," *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAD*, vol. 2, no. 1, 2019.
- [12] Bambang, "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam : Suatu Kajian Elementer," *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 3, no. 2, 2017.
- [13] M. Nuraini and M. A. F. Abdullah, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli

Desa," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, vol. 2, no. 7, 2024.

- [14] Z. Ridlwan, "Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, vol. 8, no. 3, 2014.
- [15] H. Budiaman and D. Mulyanti, "Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggali Potensi Lokal Desa," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 9, no. 1, 2021.
- [16] "Benefit Badan Usaha Milik Desa Terhadap Struktur Ekonomi dan Sosial Masyarakat," *Jurnal Ganec Swara*, vol. 17, no. 3, 2023.
- [17] D. Y. Wardhana, A. D. Pramusiwi, D. W. Handoko and D. Aribawa, "Optimalisasi Penyampaian Informasi BUMDes Amarta melalui Transformasi Visual Menggunakan Canva," *Jurnal Atma Inovasia*, vol. 5, no. 1, 2025.
- [18] I. Septiningsih and I. D. Kurniawan, "Pendampingan BUMDesa : Peran Strategis Bumdes Dan Revitalisasi Ekonomi Desa Di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo," *Jurnal Atma Inovasia*, vol. 4, no. 3, 2024.
- [19] A. Wijoyo, A. Imanda, Yusuarsono and B. A. C. Kader, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Pada Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah)," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, vol. 11, no. 1, 2024.
- [20] A. N. Zubaidah and Nugraeni, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 7, no. 3, 2023.

PENULIS



Itok Dwi Kurniawan, prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.



Ismawati Septiningsih, prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.



Zakki Adhliyat, prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.



Heri Hartanto, prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.